

Mencoreng Kesakralan Alun-alun

oleh redaksi pada 19-09-2008

Membaca berita di koran ini (15/9), tentang Alun-alun Keraton yang tak terurus, seolah menguatkan fakta bahwa ruang publik (dalam arti sesungguhnya di mana ada ruang untuk kepentingan publik) kian tersisih saja. Otoritas pembangunan di negeri ini seolah mengabaikan makna ruang publik di tengah gencarnya pembangunan fisik.

Namun dalam pandangan masyarakat yang masih menjaga warisan budaya leluhur, membuat alun-alun terbenkelay adalah sebuah tindakan mencoreng kesakralannya. Kalau kita melihat sejarahnya, alun-alun merupakan simbol. Alun-alun bukan sekadar tanah lapang. Ia merupakan saksi sejarah perubahan budaya dari sebuah kota atau kawasan. Ia menyimpan misteri yang sekaligus sebagai tanda-tanda zaman. Seumpama, pohon beringin di Alun-alun Kota Blitar (Jatim) pernah tumbang, orangpun menafsirkan sebagai tanda bencana. Entah itu kebetulan atau terpisah sama sekali, ternyata Gunung Kelud di kota itu meletus dahsyat. Contoh lain ihwal “misteri” itu, sejauh ini orang-orang luar Yogyakarta belum bisa menelaah “lebih ilmiah” tentang keberadaan sepasang pohon beringin di Alun-alun Selatan yang acapkali dilewati dengan mata tertutup. Mereka yang bisa melewati pertanda ada kabar kebaikan, sebaliknya yang gagal melewati (bahkan berputar-putar di sisi alun-alun itu) belum tersentuh kabar kebaikan dimaksud.

Alun-alun dimaknai sebagai tanah lapang yang memisahkan “dunia profan” dan “dunia sakral”. Dalam sejarah di era penjajahan, alun-alun itu memisahkan “dunia profan” kaum penjajah dan “kesakralan” rakyat tertindas yang dijajah. Sebagaimana dikemukakan sejarawan Peter BR Carey (dalam Budi Susanto, 1992) fungsi alun-alun keraton itu bisa dilihat dari konteks pertemuan antara pihak tuan rumah (keraton) dan para tamu (asing). Dahulu, secara berkala dilangsungkan pertunjukan adu binatang berupa kerbau dan harimau di Alun-alun Selatan Keraton Yogyakarta. Pertunjukan itu hakikatnya pementasan simbolik di mana kerbau “mewakili” orang Jawa yang bersifat tenang dan waspada. Sementara harimau yang gesit dan mematkan sebenarnya adalah binatang yang mudah loyo. Sejarawan asal Inggris itu menggambarkan justru kerbau sering memenangi pertarungan.

Dari paparan sejarawan itu ditafsirkan pihak tuan rumah (keraton) dan tamu (penjajah) bisa diukur kedigdayaan di alun-alun itu. Ternyata tuan rumah tetap lebih “sakti” ketimbang tamu penjajah itu. Lebih dalam lagi mau mengatakan yang “sakral” tetap lebih sakti dibandingkan yang “profan”.

Artinya, alun-alun merupakan kemenangan bagi “kesakralan”, sekaligus memantapkan alun-alun sebagai wilayah sakral. Beberapa pertanda sudah jelas, di gapura masuk ke kawasan keraton. Di Jogja misalnya tertulis “candra sangkala” yang terbaca antara lain Maha Tunggal Angeblat Allah (1141 Hijriah). Belum lagi tulisan kalimat Syahadat pada lengkung gapura serta keberadaan sebuah mesjid di dekat alun-alun itu.

Merujuk pada paparan filosofi itu, yang diperkuat oleh beberapa sejarawan, agaknya pertanyaan sejumlah warga ihwal kesakralan alun-alun adalah sebuah kewajaran. Rakyat berhak mempertanyakan bagaimana kesakralan alun-alun jika dibiarkan tak terurus?

Inilah risiko perkembangan sebuah kota. Solo pada satu sisi musti mempertahankan ikon

Kota Budaya, tetapi sisi lain berhasrat menyeberang ke simbol-simbol modern. Kedua sisi itu sulit dipertemukan, dan kalau toh dipaksakan muncul wajah-wajah mengundang tawa, kecewa, dan memicu adrenalin untuk buka suara lewat mimbar di ruang publik atau sekalian demo di lapangan.

Kita berharap saat berada di persimpangan macam ini, nilai-nilai kesakralan tetap terjaga. Banyak cara untuk menjaganya, apakah itu sekadar diurus secara layak, atau bahkan diperbaiki lebih bagus lagi tanpa membuang nilai budayanya. Kepada siapa harapan itu kita sandarkan? Tentu saja partisipasi masyarakat yang didukung oleh pemegang otoritas pembangunan, dalam hal ini pemerintah. Mudah-mudahan berita itu bisa mengetuk perhatian pemerintah. (*)

http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24968&Itemid=1